

## BAB I PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang Masalah

Era globalisasi dalam aspek ekonomi ditandai dengan terjadinya perdagangan bebas, bertemunya permintaan dan penawaran baik oleh aktor negara atau aktor non negara di dunia internasional. Hubungan saling terkait secara transparan dan intensif sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan dan dinamika pembangunan dalam negeri masing-masing negara. Globalisasi ekonomi juga terdeteksi melalui aliran barang, jasa, serta investasi ke dan dari berbagai negara tanpa menemui hambatan baik yang bersifat tarif dan non tarif sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian oleh masing-masing pihak. Di sisi lain, globalisasi merupakan manifestasi suatu sistem yang bersifat hegemonik, dimana adanya satu pihak yang memiliki *power* yang besar baik dari sisi ekonomi.

Terdapat dua kelompok besar antara negara maju dan negara berkembang. Terjadinya tarik menarik kepentingan antar negara yang dibungkus melalui cara-cara formil maupun non formil menjadi warna sendiri dalam era ini. Di sisi lain globalisasi ekonomi ditandai dengan adanya saling keterkaitan ekonomi antara dua perekonomian nasional (*interdependensi ekonomi*),<sup>1</sup> sebagai contoh dalam bentuk perdagangan atau investasi asing yang lebih eksternal, merupakan salah satu aspek globalisasi ekonomi. *Interdependensi* itu semakin intensif. *Interdependensi Ekonomi Intensif* yang melibatkan lebih dari yang sama, dalam artian bahwa interaksi erat ekonomi antar perekonomian nasional meningkat.<sup>2</sup>

Globalisasi ekonomi bisa dibilang sebagai masa ekonomi kapitalistik. Penguasaan sumber daya baik dana maupun teknologi menjadi paling depan dan mengemuka dalam ekonomi ini. Praktek-praktek kapitalisme ekonomi yang terjadi banyak menimbulkan model atau bentuk dilihat dari implikasi penerapannya. Kebebasan yang tercipta bagi seluruh pelaku ekonomi untuk

---

<sup>1</sup> Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional* (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 1999), hlm. 266.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 267.

melakukan inovasi dan pengembangan kapabilitas yang dilakukan aktor negara atau yang lainnya. Kerjasama, kompetisi, konflik dan tarik menarik antar kepentingan merupakan hal yang lumrah terjadi dan menjadi hal yang biasa. Persaingan usaha, strategi perluasan usaha menjadi tinggi volumenya sehingga mengerucutkan kepada satu pihak yang muncul sebagai pemenang dalam persaingan yang ketat ini. Jika dilihat dari sistem ekonomi ini, pada ujungnya memberikan kesempatan yang mudah bagi pihak pemilik modal. Kapital menjadikan *bargaining power* tinggi sekaligus menjadikannya sebagai aktor utama. Dengan begitu sepak terjang para pihak kapitalis seringkali menimbulkan gejolak dalam setiap aksinya baik di dalam negerinya atau di lain negaranya. Aktor sebagai pihak kapitalis bisa dari individu, korporasi besar, dan negara.

Amerika Serikat dianggap sebagai salah satu *Icon* bagi suatu negara dengan perekonomian yang berhasil dan sukses. Negara kapitalis dan sangat menjunjung tinggi faham liberalisme dengan globalisasinya. Keberhasilan ekonomi AS di tahun 1990 merupakan produk ekonomi Amerika baru yang disusun berdasarkan globalisasi, komputer dan dinamisme korporasi. Deregulasi, privatisasi dan berlanjutnya campur tangan pemerintah dalam ekonomi telah membuka jalan bagi suatu kebangkitan ulang ekonomi Amerika secara mulus. Dengan kondisi ini maka dipercaya bahwa sistim keuangan internasional atau ekonomi sebaiknya diserahkan kepada pasar yang terbuka dan tanpa regulasi. Artinya pasar yang akan memberikan konsekuensi bagi seluruh aktor-aktor yang berinteraksi di dalam pasar tersebut.<sup>3</sup>

Di tahun 1930-an, ketika dunia dilanda depresi ekonomi akibat Perang Dunia, muncul ekonom John Maynard Keynes menawarkan resep baru guna mengatasi ekonomi tersebut. Pada suatu konferensi ekonomi di Hotel Bretton Woods, New Hampshire, gagasan Keynes diterima sebagian besar peserta konferensi, yang memang bertujuan merumuskan langkah perekonomian dunia selanjutnya. Keynes, ekonom mutakhir pada saat itu, beranggapan bahwa sistem pasar adalah sistem yang terbaik yang mengatur perekonomian. *Invisible Hand*, seperti yang dikemukakan pemikir ekonom klasik Adam Smith, akan membawa efisiensi. Namun pandangan kaum ekonomi klasik itu tidak ditelan mentah-

---

<sup>3</sup> Robert Gilpin, *Tantangan Kapitalisme Global Ekonomi Dunia abad 21*, penerjemah Haris Munandar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002), hlm. 366.

mentah. Sebagai ekonom makro, menurutnya, peran negara masih dibutuhkan dalam mengatur *laissez-faire*.<sup>4</sup> Peran negara setidaknya dibutuhkan, antara lain:

1. Menstabilkan tingkat harga dan mencegah terjadinya inflasi.
2. Mengukuhkan atau memantapkan pertumbuhan ekonomi
3. Menjaga kestabilan sektor luar negeri.

Intinya peran pemerintah dibutuhkan guna mendukung pasar bebas itu sendiri. Berdasarkan pemikiran ini pula ia menyarankan pembentukan *International Monetary Fund* (IMF) dan *International Bank for Reconstruction and Development*, ini merupakan cikal bakal dari *World Bank* dalam konferensi tersebut. Konferensi Bretton ini juga mensepakati pembentukan lembaga guna memperlancar perdagangan internasional yang bebas.<sup>5</sup>

Gagasan Keynesian yang berusia lebih dari 50 tahun ini masih dipakai di Indonesia hingga kini, yakni lewat IMF nya. Hubungan Indonesia IMF secara intensif dimulai pada tahun 1998, ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi. Karena neraca pembayaran yang defisit, nilai tukar rupiah anjlok ke level drastis 10,000 rupiah. Berdasarkan kondisi ini, Indonesia akhirnya meminta bantuan IMF guna menyeimbangkan kembali neraca pembayaran yang defisit tadi. Pada *Term I*, IMF memberikan dana segar sebesar 35 milyar dollar Amerika kepada Indonesia sebagai salah satu bentuk paket perbaikan ekonomi jangka pendek.

Perjanjian Indonesia-IMF menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua pihak. Indonesia mendapatkan bantuan finansial, sedangkan IMF memberikan klausul atau rekomendasi dan syarat melalui *Letter of Intent* (LoI) kepada Indonesia. Salah satu rekomendasi yang ditawarkan IMF adalah memprivatisasi BUMN. Tujuan dari privatisasi ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi bagi kelangsungan bisnis usaha BUMN, selain itu ini sejalan dengan konsep yang digagas oleh Keynes dimana untuk memperkecil peran pemerintah dalam pasar.

---

<sup>4</sup> Istilah ini berasal dari diksi Perancis yang digunakan pertama kali oleh para *psiokrat* di abad ke 18 sebagai bentuk perlawanan terhadap intervensi pemerintah dalam perdagangan. *Laissez-faire* menjadi sinonim untuk ekonomi pasar bebas yang ketat selama awal dan pertengahan abad ke-19.

<sup>5</sup> Paul Krugman, *Makro Ekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru* (Jakarta: Raja Grafindo, 1999) di kutip dari [http://humblearno.multiply.com/journal/item/8/Privatisasi\\_merugikan\\_atau\\_menguntungkan](http://humblearno.multiply.com/journal/item/8/Privatisasi_merugikan_atau_menguntungkan), pada hari Kamis, 25 Agustus 2008, jam 10.00 WIB

Saran privatisasi dan pemberian utang dari IMF tidak juga disikapi dengan hanya begitu saja menerimanya sehingga tidak kritis terhadap efek dan imbas dari perjanjian itu. Perlu dicermati hubungan antara penghutang (debitur) dan pemberi hutang (kreditor), karena biasanya negara debitur posisinya akan selalu di bawah atau subordinat dari pemberi hutang. Negara penghutang, kebanyakan dari negara berkembang, akan lemah posisinya dihadapan pemberi hutang, yang memang kebanyakan dari negara maju. Dengan *power* yang dimilikinya, kreditor bisa mendikte politik atau ekonomi negara debitur. Dalam kaitannya dengan privatisasi, hal ini dapat dilihat dengan mudahnya pemerintah melakukan privatisasi dan divestasi terhadap BUMN tanpa adanya regulasi yang jelas. Sebagai contoh, Brazil dan Nigeria yang juga merupakan pasien IMF diharuskan mempunyai UU privatisasi sebelum menjual BUMN mereka.

Bukan hanya di negara berkembang, di negara maju pun privatisasi BUMN menimbulkan pro dan kontra yang tajam dan merupakan isu yang sangat kontroversial. Privatisasi biasanya diartikan penjualan seluruh atau sebagian kepemilikan negara pada suatu BUMN ke tangan swasta, asing dan domestik. Suatu aset milik negara melalui privatisasi serta merta akan berpindah tangan kepada pihak swasta sebagai pemilik baru. Banyak konsekuensi yang akan terjadi segera setelah kepemilikan itu pindah tangan. Pemilik baru jika jumlah sahamnya cukup besar, katakanlah di atas 20% pasti akan meminta tempat yang menentukan dalam jajaran manajemen yang baru. Dalam kasus penjualan saham PT. Indosat, Tbk, Indosat sebesar 41,94% kepada ST Telemedia yang lalu, STT meminta antara lain portofolio Direktur Keuangan. Dengan kedudukan Direktur Keuangan, ST Telemedia yang merupakan anak perusahaan dari *Singapore Technologies* (ST) akan menguasai arus dana masuk dan keluar dari Indosat serta akan menguasai *cash flow* dari Indosat. Dalam RUPS Indosat, pemerintah tidak akan dapat menentukan keputusan yang diambil karena Pemerintah menjadi pemegang saham minoritas dengan 15% kepemilikan dan sisanya sebesar 43% milik publik diberbagai belahan dunia.

Dimana pun juga termasuk di negara maju kaum buruh atau pihak karyawan tidak menyukai program privatisasi karena mereka khawatir pihak manajemen baru setelah privatisasi akan lebih meningkatkan efisiensi perusahaan

termasuk dengan cara mengurangi jumlah karyawan. Semakin kuat gerakan kaum buruh akan semakin kuat aliansi perlawanan terhadap program privatisasi dan kaum buruh di negara-negara lain terus mengkonsolidasikan kekuatan politik dan posisi tawar kolektif mereka. Perlawanan terhadap program privatisasi juga datang dari puncak manajemen perusahaan yang akan dijual karena mereka takut akan tergeser kedudukannya. Kaum birokrat yang mengendalikan suatu perusahaan negara sering melakukan perlawanan karena dengan privatisasi kekuasaan mereka akan kurang, apalagi jika perusahaan negara itu menjadi mesin pendapatan dari sang birokrat yang mengendalikannya. Rintangan terhadap program privatisasi juga datang dari kaum nasionalis yang tidak suka kepemilikan berpindah ke tangan asing, apalagi sekarang ini perlawanan terhadap globalisasi semakin kencang. Kaum nasionalis biasanya menggunakan slogan-slogan klasik seperti kemandirian guna menyampaikan pesan agar ekonomi negara tidak dikuasai dan jatuh ke tangan asing.<sup>6</sup>

Privatisasi bisa diidentikan dengan penjualan atau pembelian saham dari perusahaan negara oleh perusahaan negara lain, swasta atau individu melalui investasi langsung. Hal tersebut secara tidak langsung merupakan ide dari liberalisme ekonomi. Dimana peran pemerintah sudah dibatasi guna meningkatkan efisiensi. Kondisi ini semakin menunjukkan bahwa liberalisasi ekonomi juga ditandai dengan adanya arus kapital masif antar negara. Lalu lintas modal antar negara menjadi suatu yang lumrah dan umum. Bentuknya bisa bermacam-macam, mulai investasi langsung, privatisasi, sampai kerjasama dalam eksplorasi sumber-sumber daya alam. Investasi kapital bisa dari *MNCs* atau *TNCs*, negara, kelompok dan Individu. Menarik untuk disimak adalah fenomena di beberapa tahun terakhir ini dalam sistim global ekonomi, arus dana dalam jumlah besar tidak lagi bersumber dari pihak swasta tapi dari sebuah korporasi atau perusahaan yang bermodalkan aset sebuah negara atau BUMN. Dinamika ini dikenal dengan istilah Kapitalisme Negara atau bentuk *Sovereign Wealth Funds*. Kini banyak negara umumnya negara berkembang berlomba memperkuat BUMN dan lembaga investasi mereka sendiri dan mencari target di negara lain, termasuk

---

<sup>6</sup> Mar'ie Muhammad, "PRO & KONTRA PRIVATISASI," dalam Koran Tempo, edisi Kamis, 2 Januari 2003, hal.2, diakses dari <http://gema.inaport.co.id/artikel/ARTIKEL%PRIVATISASI.pdf> pada Hari Minggu, tanggal 19 April 2009, jam 23.15 WIB

negara-negara maju. BUMN menjadi motor pembangunan ekonomi dalam negeri sekaligus pionir dalam manuver globalisasi, internasionalisasi dan akumulasi kekayaan sejumlah negara berkembang lain di pentas global.<sup>7</sup>

Salah satu bentuk yang umum dalam manuver tersebut adalah menanamkan modalnya dengan membeli atau memiliki saham suatu perusahaan atau perusahaan milik negara di suatu negara menjadi sasaran dalam rangka perluasan pengembangan usahanya. Sekadar contoh, lembaga investasi milik pemerintah UEA, yakni ADIA (*Abu Dhabi Investment Authority*) saat ini mengelola dana sekitar USD 625 miliar, jauh lebih besar daripada General Motors. Demikian pula, *China Investment Corporation* menguasai dana USD 200 miliar. Negara-negara itu berhasil menghimpun dana yang besar berkat penumpukan cadangan devisa (Tiongkok memiliki cadangan devisa sekitar USD 1.000 miliar), bonanza minyak, dan dana pensiun dalam negeri.<sup>8</sup>

Dari beberapa lembaga investasi negara, mungkin Temasek Holding dari negara Singapura yang cukup mencuri perhatian dengan sepak terjangnya di negara-negara Asia terutama di Asia Tenggara. Sejarah Temasek Holding erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi Singapura sejak kemerdekaan negara ini. Pada tahun 1965 Singapura melepaskan diri dari Persekutuan Malaysia, saat itu Singapura tidak memiliki sektor swasta yang kuat untuk mendukung pertumbuhan. Pemerintah memainkan perannya sebagai pengusaha untuk mempercepat laju perekonomian dengan membentuk lembaga investasi yang kita kenal dengan Temasek Holdings yang didirikan pada tahun 1974. Sekarang ini Temasek Holding menjadi ujung tombak pertumbuhan ekonomi Singapura melalui investasi modal usahanya samapai keluar negaranya termasuk ke Indonesia.

Selain di dalam negeri, Temasek Holding dan perusahaan-perusahaan milik pemerintah di negara lain mulai melakukan ekspansi atau mengakuisisi perusahaan vital lain di luar negeri dalam rangka meraih keuntungan guna mendukung pertumbuhan ekonomi bagi *Home Country*. Bagi *Host Country*, divestasi dan privatisasi atau menjual aset negara kepada perusahaan negara lain

---

<sup>7</sup> Mr. Boen, "Bangkitnya Kapitalisme Negara," di akses dari <http://www.mail-archive.com/obrolan-bandar@yahooogroups.com/msg43302.html>, pada (Pada Hari Sabtu, tanggal 7 february 200, jam 20.23 WIB)

<sup>8</sup> *Ibid.*

ini menjadi polemik, pihak yang tidak setuju dengan penjualan kepada pihak asing pada umumnya mendasarkan pendapatnya pada konsep nasionalisme ekonomi, sedangkan pihak yang sebaliknya mendasarkan pada konsep pasar bebas dan globalisasi. Walaupun mungkin merupakan simplifikasi, nasionalisme ekonomi akan dipandang sebagai antitesis dari pasar bebas (liberalisme) yang dilakukan oleh SWFs.

Indonesia merupakan salah satu kalo tidak bisa dikatakan tujuan investasi dari fenomena ini. Stephen D. Krasner dalam tulisannya *State Power and The Structure of International Trade*, memaparkan bahwa hubungan antara kepentingan dan power suatu negara berkaitan dengan tingkat keterbukaan negara itu dalam ekonomi internasional. Dia mengidentifikasi ada empat tujuan bagi suatu negara yaitu: untuk meningkatkan *political power, aggregate national income, economic growth dan social stability*.<sup>9</sup> Empat faktor di atas seyogyanya dapat dimaksimalkan. Dalam konteks ini negara Indonesia termasuk di dalamnya. Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai tujuan nasional memajukan kesejahteraan negara dengan membuka pasar dalam negeri sehingga dengan leluasa masuknya kapital-kapital asing ke dalam negaranya. Khusus untuk akhir tahun 90-an dimana terjadi krisis ekonomi Indonesia membuat Indonesia tidak bisa mengelak dari serbuan FDI ke dalam negeri.

Divestasi dan privatisasi telah berlangsung di Indonesia pascakrisis ekonomi akhir dekade 90-an hingga sekarang. Kasus yang terjadi sebagian besar adalah merupakan perusahaan ternama di bidang perbankan dan telekomunikasi. Dalam bidang telekomunikasi misalnya, penguasaan asing atas sektor-sektor vital dan strategis ini terlihat nyata di Indonesia. PT. Indosat dan PT. Telkomsel beberapa bagian saham kepemilikannya antara lain dimiliki oleh perusahaan telekom dari Singapura. Di samping itu perusahaan telekomunikasi dari Malaysia, Telecom Malaysia, saat ini telah menguasai 27,3% saham PT Excelcomindo Pratama. Bahkan, perusahaan dari negeri jiran itu sedang menyelesaikan proses negosiasi untuk menguasai 51% saham operator telekomunikasi seluler tersebut. Itu belum termasuk perusahaan telekomunikasi domestik lainnya, seperti PT Cyber Access Communication(CAC), dan PT

---

<sup>9</sup> Stephen D. Krasner, *Perspective on Global Power and Wealth* (Routledge, Taylor and Francis Group, Frieden and Lake, 2000), hlm. 19

Bosowa Singtel yang juga sudah dikuasai asing, baik dari Singapura, Malaysia ataupun Hong Kong.<sup>10</sup>

Dari sekian banyak privatisasi atau pengalihan saham tersebut mungkin privatisasi kasus PT Indosat Tbk. merupakan kasus yang cukup menyita perhatian dalam Negeri Indonesia pada tahun 2002 yang menjual sahamnya kepada investor asing sebuah perusahaan Singapura, yaitu STT Telecom sebesar 42% kepemilikan. Kepemilikan STT Telecom tersebut merupakan saham mayoritas, sehingga memiliki hak yang menentukan arah perusahaan. Di samping PT Indosat Tbk, yang salah satu divisinya adalah bisnis seluler (gabungan Satelindo dan IM3) dan saat ini menguasai pangsa pasar 12 juta pelanggan, Singapore Telcom kini juga telah menguasai 35% saham Telkomsel, anak perusahaan PT Telkom Tbk., operator seluler terbesar di Indonesia yang kini memiliki 20 juta pelanggan. Pandangan yang kontra terhadap privatisasi itu menyatakan bahwa penjualan tersebut akan membahayakan kepentingan nasional, mengingat Indosat merupakan perusahaan operator satelit dan komunikasi yang dipandang sebagai hajat hidup orang banyak yang sesuai konstitusi seharusnya dikuasai oleh negara. Sementara pandangan yang setuju menyatakan bahwa privatisasi tersebut akan menguntungkan perekonomian, karena akan menciptakan persaingan bagi industri telekomunikasi di dalam negeri. Dan tentu saja, dalam jangka pendek akan memberikan tambahan setoran ke APBN yang defisit. Hal ini sesuai dengan kondisi krisis ekonomi serta tuntutan syarat yang ditetapkan oleh IMF dalam memberikan bantuan finansial kepada Pemerintah Indonesia. Menjadi polemik ketika diketahui bahwa *STT Telecom* dan *Singapore Telcom* merupakan anak perusahaan perusahaan Temasek Holding Corp. yang merupakan SWFs bentukan pemerintah Singapura.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai investasi Temasek pasca kebijakan pemerintah dalam hal privatisasi di Indonesia pasca krisis ekonomi 1998, dalam kasus pengambilalihan saham PT. Indosat, Tbk, tahun 2002.

---

<sup>10</sup> Setyo Wibowo, "Divestasi dan Privatisasi Aset Negara Ke Investor Asing Antara Nasionalisme dan Keniscayaan Globalisasi," diakses dari <http://setyowibowo.wordpress.com>, diakses pada Hari Selasa 6 Januari 2009, pada jam 01.39 WIB

## I.2 Perumusan Masalah

Dampak globalisasi dan krisis yang mendera Asia Tenggara termasuk Indonesia membuat pemerintah mengambil langkah privatisasi guna menutupi defisit APBN dan dianggap sebagai cara jitu dalam memperbaiki kondisi keuangan negara. Selain itu privatisasi merupakan syarat yang diajukan oleh IMF dalam memberikan bantuan finansial kepada Pemerintah Indonesia pada saat itu. Pengalihan saham PT. Indosat Tbk. oleh Temasek Holding Corp. yang merupakan *Sovereign Wealth Funds* bentukan pemerintah Singapura adalah salah satu contoh privatisasi di Indonesia pasca krisis ekonomi yang melanda Asia dan Indonesia pada akhir tahun 1990an, privatisasi ini juga merupakan salah satu bentuk kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia setelah menanda tangani *Letter of Intent* sebagai bentuk prasyarat dari lembaga IMF dalam rangka memberikan bantuannya.

*Sovereign Wealth Funds* merupakan fenomena baru dalam perekonomian internasional. Pada umumnya, SWFs merupakan bentuk BUMN, bergerak dalam aktivitas ekonomi domestik. Perkembangan ekonomi internasional yang terjadi menciptakan peluang untuk dapat berkiprah lebih luas dan tidak terbatas oleh batas teritorial suatu negara, hal ini sejalan dengan era globalisasi ekonomi. Dengan menggerakkan BUMN nya negara-negara dengan cadangan devisa berlimpah beraktivitas dalam sistim internasional. Arus lalu lintas keuangan yang masif menjadi bukti bahwa aspek kapital merupakan aspek dominan dalam era ini. Dengan kondisi ini BUMN suatu negara melakukan internasionalisasi usaha dan kegiatannya dan terlibat langsung dalam mengakuisisi dan pengambilalihan saham perusahaan di suatu negara dengan jalan privatisasi atau investasi langsung. Temasek Holding merupakan salah satu BUMN Negara Singapura yang telah melakukan internasionalisasi usahanya.

Berpijak dari paparan diatas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah *bagaimana kebijakan pemerintah dalam proses privatisasi BUMN di Indonesia dilihat dari faktor internal dan eksternal, pada kasus pengambilalihan saham PT. Indosat Tbk. Oleh Temasek Holding pada Tahun 2002 ?*

### **I.3 Signifikansi Penelitian dan Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan privatisasi salah satu perusahaan dalam negeri Indonesia, PT. Indosat Tbk, paska krisis ekonomi Asia. Kebijakan privatisasi yang masuk sebagai salah satu syarat IMF dalam member bantuan finansial kepada Pemerintah Indonesia. Hal itu dikaitkan dengan adanya fenomena internasionalisasi BUMN negara Singapura dalam hal ini Temasek Holding. Signifikansi penelitian ini adalah menunjukkan bahwa BUMN suatu negara (dalam hal ini Temasek Holding) dapat mengekspansi usahanya dengan penanaman modal langsungnya keluar negaranya.

### **I.4 Tinjauan Pustaka**

Sebagai tinjauan kepustakaan, penulis memilih Tesis dari Luli Barlini, mahasiswa angkatan 2003 Pasca Sarjana Fakultas Hubungan Internasional Universitas Indonesia yang berjudul “Privatisasi BUMN Di Indonesia Dalam Masa Krisis Ekonomi Asia, Studi Kasus Privatisasi PT. Indosat 1999 – 2002” yang telah dipublikasikan di perpustakaan sekertariat program S2 jurusan Hubungan Internasional.

Disebutkan bahwa kebijakan RI melakukan privatisasi adalah untuk mengatasi masalah keuangan negara dalam menghadapi krisis ekonomi, program reformasi ekonomi dan penyehatan BUMN secara umum. Sederhananya, penjualan aset negara dilakukan untuk menutupi defisit APBN 2002. Ini merupakan tuntutan dari persyaratan yang dikedepankan IMF dalam memberikan kucuran dana sebagai bantuan dalam memulihkan perekonomian negara. Hal tersebut dikenal dengan sebutan *Washington Consensus* yang isinya tentang kebijakan pembangunan yang yang harus dilakukan oleh negara berkembang termasuk Indonesia. Kebijakan ini membuat Indonesia melaksanakan paket kebijakan atau *Structural Adjustment Policy* (SAP) yang mencakup berbagai pembaruan kebijakan ekonomi makro dan perubahan kelembagaan untuk menghapuskan inefisiensi serta menjamin tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai. SAP yang dijalankan Indonesia mencakup 4 hal, antara lain : (1) Liberalisasi Impor dan pelaksanaan aliran sumber-sumber keuangan secara bebas, (2) Devaluasi, (3) Pelaksanaan kebijakan moneter dan fiskal di dalam

negeri, (4) Pemasukan Investasi Asing yang lebih lancar. 4 poin di atas merupakan ciri-ciri umum konsep Liberalisasi ekonomi. Free Trade dan kapitalisme ekonomi sangat jelas dan semakin menyentuh sektor-sektor vital dalam negeri Indonesia. Kapitalisme ekonomi berarti penguasa modal menjadi pihak segala-galanya dan mempunyai dampak negatif jika dilihat dari sisi keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat suatu negara.

Tinjauan artikel, penulis memilih sebuah artikel berjudul *Governance, leadership and economic growth in Singapore*, Venu Menon, Sudha ICAFI Business School, ahmedabad, 28 August 2007, Munich Personal RePEc Archive. Dalam tulisan itu dikatakan bahwa pada akhir tahun 60an ketika negara di kawasan asia sedang mengalami keterpurukan ekonomi, ketidakstabilan sosial dan politik, Singapura justru melakukan usaha yang cukup berani dengan meliberalisasikan ekonominya dengan strategi perdagangan internasional dan dengan kapitalistik negaranya membuat Singapura menjadi icon bagi pertumbuhan ekonomi di kawasan. *Developmental State* dan sistem politik yang paternalistik sangat berperan bagi kesuksesan ekonomi Singapura. Pemerintah singapura yang cenderung otoritarian, berhasil membuat kebijakan yang tepat dan sesuai dengan kondisi dalam negerinya. Kebijakan yang efisien dan transparan membuat sektor ekonomi dapat berjalan dengan baik. Implikasi dari kebijakan-kebijakan yang dibuat dalam ekonominya adalah dengan menekan dan menghilangkan kekuatan dan kepemilikan bagi sektor swasta. Dengan tidak adanya kekuatan sektor swasta maka pemerintah dengan leluasa mengintervensi pasar guna mengatur pembangunan ekonomi secara efektif. Disini sektor swasta menjadi partner bagi pemerintah guna melaksanakan pembangunan ekonomi yang menjadi tujuan nasional negaranya.<sup>11</sup>

Bahan lain yang bisa menjadi dasar pemikiran adalah dalam jurnal, *Two Faces Of Privatization*, oleh David R. Morgan, University Of Oklahoma dan Robert E. England, Oklahoma State University. Dalam tulisan tersebut penulis menyebutkan bahwa dalam privatisasi selalu muncul isu equity atau

---

<sup>11</sup> Venu Menon Sudha, "Governance, leadership and economic growth in Singapore," *ICFAI Business School*, Munich Personal RePEc Archive, ahmedabad, 28 August 2007, MPRA Paper No. 4741

keseimbangan antara kepentingan negara dan swasta. Dimana negara telah melepas fungsi kontrol dalam mengatur perusahaan tersebut. Dalam arti sempitnya bahwa perusahaan yang telah di swasta kan akan diatur lebih berpihak kepada swasta dengan sedikit mengabaikan kepentingan masyarakat luas secara umum. Tarik menarik antara ekonomi dan politik inilah yang menjadi telaah dalam kaitannya dengan privatisasi PT. Indosat di Indonesia.

Bahan berikut yang juga menjadi acuan untuk meninjau relevansi kasus penelitian dengan apa yang terjadi di luar Indonesia, tertuang dalam J-STOR jurnal yaitu *Foreign Direct Investment, Political Resentment and the Privatization Process in Eastern Europe* Author(s): Hans-Werner Sinn, Alfons J. Weichenrieder, Bruno S. Frey, Ailsa A. Roell Source: *Economic Policy*, Vol. 12, No. 24, (Apr., 1997), pp. 179-210 Published by: Blackwell Publishing on behalf of the Centre for Economic Policy Research, Center for Economic Studies. Dalam tulisannya, disebutkan bahwa investasi asing langsung dan privatisasi terjadi dimana-mana termasuk negara-negara di eropa dan selalu memunculkan kebencian bagi dalam negeri suatu negara. Penjualan asset negara kepada pihak asing merupakan hal yang menakutkan, pihak asing akan mengeksploitasi sumber daya yang ada untuk kepentingan mereka masing-masing dan ini terjadi di bukan negaranya.<sup>12</sup>

Beberapa tinjauan kepustakaan di atas ini dapat memberikan gambaran dalam menganalisa dan mengkaji proses privatisasi yang merupakan kebijakan Pemerintah Indonesia paska krisis asia dengan kasus Privatisasi PT. Indosat Tbk, dikaitkan dengan internasionalisasi BUMN Singapura dalam hal ini Temasek Holding.

---

<sup>12</sup> Hans-Werner Sinn, Alfons J. Weichenrieder, Bruno S. Frey, Ailsa A. Roell Source, "Foreign Direct Investment, Political Resentment and the Privatization Process in Eastern Europe," *Economic Policy*, Vol. 12, No. 24, (Apr., 1997), pp. 179-210, Published by: Blackwell Publishing on behalf of the Centre for Economic Policy Research, Center for Economic Studies, and the Maison des Sciences de

## I.5 Kerangka Teori

### I.5.1 Privatisasi

Konsep utama dalam penelitian ini adalah **Privatisasi**, secara umum privatisasi mempunyai pengertian sebagai salah satu upaya mengembalikan aktivitas perekonomian kepada masyarakat / pasar dengan memperkecil campur tangan pemerintah dalam perekonomian tersebut serta merupakan upaya reformasi kebijakan ekonomi yang lebih luas yang mencakup deregulasi, debirokratisasi dan liberalisasi.

Sedikit memberi gambaran tentang kemunculan gagasan dikembalikannya sistem perekonomian kepada pasar. Di tahun 1930-an, ketika dunia dilanda depresi ekonomi akibat Perang Dunia, muncul ekonom John Maynard Keynes menawarkan resep baru guna mengatasi krisis ekonomi tersebut. Pada suatu konferensi ekonomi di Hotel Bretton Woods, New Hampshire, gagasan Keynes diterima sebagian besar peserta konferensi, yang memang bertujuan merumuskan langkah perekonomian dunia selanjutnya. Keynes, ekonom mutakhir pada saat itu, beranggapan bahwa sistem pasar adalah sistem yang terbaik yang mengatur perekonomian. Invisible hand, seperti yang dikemukakan pemikir ekonomi klasik Adam Smith, akan membawa efisiensi. Namun, pandangan kaum ekonomi klasik itu tidak ditelan mentah-mentah. Sebagai ekonom makro, menurutnya, peran negara masih dibutuhkan dalam mengatur *laissez-faire*. Peran negara setidaknya dibutuhkan untuk (1) menstabilkan tingkat harga dan mencegah terjadinya inflasi, (2) mengukuhkan atau memantapkan pertumbuhan ekonomi, dan (3) menjaga kestabilan sektor luar negeri. Intinya, peran pemerintah dibutuhkan guna mendukung pasar bebas itu sendiri. Berdasarkan pemikiran itu pula ia menyarankan pembentukan *International Monetary Fund* (IMF) dan *International Bank for Reconstruction and Development* (yang nantinya berubah menjadi World Bank) dalam konferensi tersebut. Konferensi Bretton ini juga menepakati pembentukan lembaga guna memperlancar perdagangan internasional yang bebas<sup>13</sup>.

Gagasan Keynes yang berusia lebih dari 50 tahun itu masih dipakai di Indonesia hingga kini, yakni lewat IMF-nya. Hubungan Indonesia-IMF dimulai

<sup>13</sup> [http://humblemarno.multiply.com/journal/item/8/Privatisasi\\_merugikan\\_atau\\_menguntungkan](http://humblemarno.multiply.com/journal/item/8/Privatisasi_merugikan_atau_menguntungkan), *Op. Cit.*,

pada tahun 1998, ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi. Karena neraca pembayaran yang jomplang, nilai rupiah anjlok ke level drastis 10000 ribu Rupiah. Indonesia akhirnya meminta bantuan IMF guna menyeimbangkan kembali neraca pembayaran yang jomplang tadi. Pada term pertama IMF memberikan dana segar sebesar 35 Milyar Dollar Amerika kepada Indonesia sebagai salah satu bentuk paket perbaikan ekonomi jangka pendek. Perjanjian Indonesia-IMF menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua pihak. Indonesia mendapatkan dana, sedangkan IMF memberikan klausul atau rekomendasi dan syarat melalui Letter of Intent (LoI) kepada Indonesia. Salah satu rekomendasi yang ditawarkan IMF kepada Indonesia adalah memprivatisasi Badan Usaha Milik Negara. Inilah yang menjadi pokok analisa dalam penelitian ini.

Tujuan atau alasan privatisasi, menurut Vicker dan Yarrow dalam *The Political Economy of Privatization (1993)*, adalah; memperkecil keterlibatan pemerintah dalam industri, meningkatkan efisiensi dari industri yang diprivatisasi, memperluas kepemilikan (nonmonopoli), mendorong karyawan mendapatkan kepemilikan juga, mendapatkan keuntungan secara politik, memperkecil sektor publik dalam persyaratan peminjaman, dan mempermudah masalah sektor publik dari lemahnya persatuan sektor publik.

Tujuan positif dari privatisasi adalah salah satunya menurut Vicker dan Yarrow adalah memperluas kepemilikan, yang sebelumnya hanya satu pihak yang memiliki (pemerintah), dengan privatisasi berarti saham kepemilikan dapat dimiliki oleh beberapa pihak non pemerintah (swasta). Namun begitu, langkah ini harus dilakukan dengan hati-hati. Maksudnya, agar tercipta iklim kompetisi yang sehat, penjualan saham pemerintah mesti dilakukan secara menyebar. Artinya tidak memberi kebebasan kepada satu pihak saja.

Deskripsi konsep privatisasi ini sesuai dengan paparan dari B. Ruru yang menjelaskan bagaimana peran pemerintah dalam kepemilikan saham suatu perusahaan atau BUMN dapat dialihkan sebagian atau keseluruhan asetnya dan kontrol kepada sektor swasta, dengan mencakup beberapa proses :

1. Deregulasi

Merupakan proses peninjauan kembali perangkat hukum yang ada, biasanya dalam bentuk penyederhanaan peraturan-peraturan, sehingga

BUMN dapat beroperasi secara fleksibel dan pengurangan monopoli oleh sektor publik.

## 2. Liberalisasi

Yakni menghilangkan hambatan dalam kekuatan perekonomian dengan cara membuka peluang kepada sektor swasta untuk memasuki pasar yang sebelumnya secara monopoli dilakukan oleh BUMN.

## 3. Komersialisasi

Merupakan penekanan bahwa BUMN apapun bentuknya ditempatkan dalam konteks komersial, dengan ciri yang tidak berbeda dengan usaha swasta, kecuali dari segi pemilik dan sistem pertanggungjawabannya serta reformasi administrasi yaitu penyederanaan administrasi BUMN dan memberikan keleluasaan kepada manajemen untuk mengambil keputusan bisnis.

Beberapa pengamat mengemukakan pengertian Privatisasi dilihat dari beberapa sudut pandang, salah satunya adalah dari Indra Bastian dalam bukunya “*Privatisasi Di Indonesia Teori Dan Implementasi*” yang mengemukakan melalui sudut pandang karakteristik jenis produk atau jasa, yaitu bahwa :

Proses privatisasi dipengaruhi oleh ketersediaan prosedur (availability of procedures) efisiensi dan efektivitas, skala, lebih responsif terhadap *customer* dan *economic equity*. Jika ketersediaan prosedur ada, maka kecenderungan untuk privatisasi menjadi lebih besar. Jika produk atau jasa yang harus disediakan memiliki karakteristik yang spesifik dan khusus maka pemerintah memilih untuk memprivatisasi.<sup>14</sup>

Pendapat lainnya adalah dari Savas dalam bukunya “*Privatization The Key Better Government*” yang mengemukakan privatisasi dari keterlibatan pemerintah dikaitkan dengan inefisiensi, yaitu bahwa :<sup>15</sup>

Apabila pemerintah terlalu banyak bergerak dalam sektor ekonomi, maka akan mengakibatkan terjadinya ketidakefisienan dalam sistem perekonomian nasional.

<sup>14</sup> Indra Bastian, *Privatisasi di Indonesia Teori dan Implementasi* (Jakarta, Salemba Empat, 2002) hlm. 17.

<sup>15</sup> E.S. Savas, *Privatization: The Key to Better Government* (New Jersey, 1987), hlm. 3.

Ketidakefisienan dalam arti ketidakmampuan pemerintah di dalam menata atau mengalokasikan sumber daya yang tersedia, baik yang menyangkut sumber daya manusia, keuangan maupun yang lainnya. Dari konsep tersebut diatas dapat dikatakan bahwa masalah efisiensi menjadi masalah yang sangat penting mengingat terbatasnya sumber sumber daya privatisasi yang ada.

Privatisasi sebenarnya memindahkan kepemilikan perusahaan-perusahaan milik negara kepada swasta atau sektor privat. Pemerintah tidak lagi mengontrol perusahaan tersebut, melainkan diserahkan kepada swasta. Terdapat pro-kontra perihal privatisasi ini. Menurut mereka yang mendukung, privatisasi akan mendorong efisiensi perusahaan itu sendiri, selain pemerintah mendapatkan dana dari hasil penjualan BUMN tersebut untuk menutupi anggaran (APBN) dan utang luar negeri. Sedangkan yang kontra beranggapan bahwa perusahaan milik negara (yang biasanya menguasai hajat milik orang banyak) haram hukumnya dijual kepada swasta. Hal itu bertentangan dengan UUD 45 Pasal 33 tentang ekonomi. Selain itu, prasangka terhadap asing yang nanti membeli perusahaan negara sedikit banyak juga mempengaruhi. Tujuan positif dari privatisasi adalah salah satunya menurut Vicker dan Yarrow adalah memperluas kepemilikan, yang sebelumnya hanya satu pihak yang memiliki (pemerintah), dengan privatisasi berarti saham kepemilikan dapat dimiliki oleh beberapa pihak non pemerintah (swasta). Namun begitu, langkah ini harus dilakukan dengan hati-hati. Maksudnya, agar tercipta iklim kompetisi yang sehat, penjualan saham pemerintah mesti dilakukan secara menyebar. Artinya tidak memberi kebebasan kepada satu pihak saja. Hal diatas sejalan dengan apa yang dikemukakan dikemukakan pengamat, yaitu Heald, yang melihat privatisasi dari terminologinya, bahwa terminologi privatisasi pada dasarnya terdiri dari empat aktivitas yang dijabarkan secara terpisah :<sup>16</sup>

1. Privatisasi dalam aspek keuangan merupakan suatu jasa berkelanjutan yang diproduksi oleh sektor publik.
2. Privatisasi aspek produk jasa yang dibiayai oleh sektor publik yaitu pada kontrak, bidang pendidikan dan berupa vouchers.

---

<sup>16</sup> Indra Bastian, *Op. Cit*, hlm. 18.

3. Adanya swastanisasi dan penghapusan kepemilikan pemerintah, yang diartikan sebagai penjualan perusahaan publik dan pemindahan fungsi pengelolaan perusahaan dari negara ke sektor swasta.
4. Adanya pembebasan pasar yang diartikan sebagai pelanggaran terhadap “status monopoli” atau pengaturan terhadap lisensi yang menghambat sektor swasta dalam memasuki pasar yang disuplai sektor publik.

Diketahui bahwa privatisasi memang merupakan syarat mutlak yang tertuang dalam LoI antara pemerintah dengan IMF. Hal ini ditindaklanjuti dengan perumusan Master Plan bagi reformasi BUMN di Indonesia. Dalam master plan itu Pemerintah Indonesia mengartikan bahwa privatisasi mengandung makna sebagai berikut :<sup>17</sup>

- Perubahan peranan pemerintah sebagai pemilik dan pelaksana menjadi sebagai regulator dan promotor dari kebijaksanaan dan penetapan sasaran baik nasional maupun sektoral.
- Memilih metode dan waktu privatisasi serta memilih pembeli yang terbaik bagi perseroan dan negara dengan mengacu kepada sasaran-sasaran pemerintah.

Pro-kontra perihal privatisasi ini merupakan sesuatu yang umum terjadi di beberapa negara. Efisiensi dan meningkatkan kinerja perusahaan merupakan alasan yang pro sebaliknya dengan yang kontra, lebih mengarah kepada alasan nasionalisme bernegara. Resistensi terhadap privatisasi BUMN setidaknya dipengaruhi oleh beberapa hal.<sup>18</sup> Pertama, kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai keuntungan yang didapat dari perusahaan yang dijual kepada swasta. Kedua, tidak adanya peraturan atau regulasi yang jelas-jelas mengatur privatisasi. Seperti BUMN apa saja yang boleh dijual kepada swasta, bagaimana teknis penjualannya, bagaimana pengawasan BUMN tersebut oleh pemerintah, dan seterusnya.

---

<sup>17</sup> Master Plan BUMN 2002 – 2006

<sup>18</sup> E.S. Savas, *Op. Cit*, hal 8

Regulasi dibutuhkan agar negara tidak dirugikan oleh swasta dan swasta pun jelas dengan hak dan kewajiban yang didapatnya.

Pemerintah sebenarnya bukanlah satu satunya pihak yang terkait dalam hal privatisasi, banyak pihak-pihak lainnya seperti pegawai pemerintah, manajer, pekerja serta politisi. Pihak-pihak yang mempunyai kepentingan (*stakeholders*) dalam privatisasi pasti mempunyai kepentingan (*interest*) yang berbeda-beda. Pemerintah dan pegawai lokal (*Local Officials*), berkepentingan untuk menambah pendapatan negara sehingga dapat mengurangi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan para politisi memanfaatkan isu ini sebagai kekuatan politik untuk mendorong pemerintah membenahi perusahaan-perusahaan milik negara supaya lebih produktif, di sisi lain privatisasi di nilai sebagai upaya pemerintah menjual asset negara kepada pihak lain yang sudah barang tentu merugikan negara untuk masa yang akan datang.

Pandangan lain dikemukakan oleh Frances Seymour bahwa dalam melakukan privatisasi harus mengacu kepada konsep *Good Corporate Governance*.

### **I.5.2. Investasi Langsung**

Konsep lain yang ikut di analisa dalam kasus ini adalah **Investasi langsung** melalui ekspansi modal usaha dari BUMN suatu negara keluar negaranya dalam bentuk akuisisi atau kepemilikan saham perusahaan atau BUMN negara lain. Sebelum masuk pada investasi langsung, ada satu konsep yang melatarbelakangi investasi langsung ke luar negeri yaitu Internasionalisasi, adalah istilah yang digunakan ketika dibawahnya suatu permasalahan lokal atau regional menjadi urusan dunia internasional atau antar bangsa.<sup>19</sup> Meski sering dipertukarkan dengan globalisasi, istilah internasionalisasi sebenarnya lebih banyak merujuk pada urusan politik dan ekonomi yang melibatkan beberapa aktor baik negara maupun non negara. Sementara globalisasi lebih merujuk pada tidak adanya lagi batas-batas negara dalam hubungan perdagangan, investasi, budaya populer, dan lainnya. Untuk menanalisa kebijakan peningkatan investasi langsung

---

<sup>19</sup> Yeung Henry Wai-Chung dan Edward Elgar, *Entrepreneurship and the Internationalization of Asian Firms*, diakses dari <http://www.egrg.org.uk/pdfs/jones.pdf>, pada Hari Minggu tanggal 18 Januari 2009, pada jam 11.13 WIB

Singapura, dapat dilihat dari perspektif pemikiran Internasionalisasi. Wong Poh Kam dan Ng Chee Yuen, dalam, “*Singapore’s Internationalization Strategy for the 1990’s*, Southeast Asian Affairs 1991, mengemukakan perspektif internationalization dinyatakan bahwa menghadapi tekanan-tekanan yang berasal dari internal maupun eksternal, sangat sulit untuk melanjutkan pembangunan ekonomi dengan menggunakan strategi pembangunan yang lama. Secara internal singapura seperti negara industri baru (NIC) lainnya telah mencapai tahap pertumbuhan strategis yang berorientasi ke masa depan dan dihadapkan pada berbagai keterbatasan sumber daya karena geografisnya yang kecil.<sup>20</sup>

Pertumbuhan ekonomi dan semakin meningkatnya pertumbuhan akan pendapatan, air, tanah, persediaan tenaga kerja dan lainnya semakin kritis baik oleh investor lokal maupun asing. Dan secara eksternal singapura dihadapkan pula oleh perubahan lingkungan internasional diantaranya adalah :<sup>21</sup>

1. Terbentuknya kompetisi yang semakin intensif dari negara-negara yang mempunyai kemampuan untuk menjadi saingan NICs spt Malaysia, Mexico
2. Pasar industri utama produk kebutuhan dan jasa yang semakin proteksionis di negara-negara berkembang dan kawasan eropa. Negara-negara ini merupakan sasaran ekspor yang nilainya cukup besar sehingga mempengaruhi angka ekspor Singapura. Ini pada merupakan kelanjutan dari meluasnya bentuk *new protectionisme*.<sup>22</sup>

Tekanan-tekanan ini mengakibatkan ekspor produksi Singapura yang kurang bervariasi ke negara konsumen. Untuk itu pemerintah perlu menyusun strategi pembangunan baru dan mengingat kondisi internal tidak memungkinkan lagi maka alternatif internasionalisasi menjadi jalan yang paling efektif. Internasionalisasi modal adalah salah satu alternatifnya.

Penerapan internasionalisasi yang dilakukan Singapura terutama dalam bentuk investasi langsung ke luar negeri. Melalui beberapa lembaga investasinya

<sup>20</sup> Wong Poh Kam dan Ng Chee Yuen, “*Singapore’s Internationalization Strategy for the 1990’s*,” *Southeast Asian Affairs*, Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, 1991

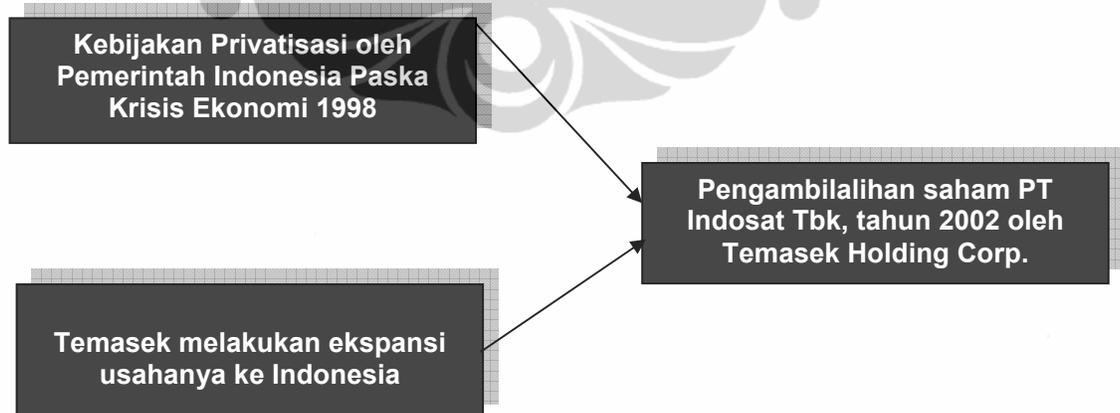
<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 269.

<sup>22</sup> *New Protectionisme* adalah istilah dalam International Political Economy yang menggambarkan perlindungan terhadap perekonomian dalam negerinya, dengan menerapkan trade barrier seperti tariff bea masuk, subsidi dalam negeri, quota dan kebijakan lain yang mengharuskan negara eksportir menambah beban bagi lancarnya kegiatan ekspornya.

seperti Temasek, implementasi dan pemilihan bentuk investasi langsung oleh Singapura adalah dimaksudkan untuk mengatasi tekanan-tekanan yang telah disebutkan diatas. Investasi langsung atau dikenal dengan *FDI (Foreign Direct Investment)* merupakan pergeseran modal internasional dimana suatu perusahaan di suatu negara menciptakan atau meluaskan modalnya ke negara lain. Investasi langsung dimaksudkan adalah untuk mendapatkan fungsi kontrol dalam produksi, pemasaran, dan fasilitas lainnya di perusahaan tujuan investasinya, ini berbeda dengan investasi tidak langsung.<sup>23</sup> Bentuk investasi langsung dapat berwujud dengan menguasai bisnis yang sudah ada atau membangun bisnis baru sehingga dengan demikian pelaku investasi akan mendapatkan otoritas untuk menentukan arah dan tujuan serta aktivitas bisnisnya.<sup>24</sup> Dalam konteks ini Singapura dapat menentukan segala kebijakannya dalam kelangsungan bisnis di negara tujuan investasinya.

Untuk mendeskripsikan dan menjabarkan kerangka konsep dalam proses penelitian ini dapat dilihat seperti bagan 1. Berikut ini :

**Bagan 1**  
**Model Analisis**  
**Investasi Temasek Paska Krisis Di Indonesia**  
**Kasus Pengambilalihan Saham PT. Indosat Tbk. Oleh Temasek**  
**pada Tahun 2002**



<sup>23</sup> James Riedel, "Direct Investment, Intra-Asian Trade and Foreign Direct Investment", *Asian Development Review*, Vol.9, No. 1, 1991, hlm. 114-117.

<sup>24</sup> Gilpin, *Op. Cit.*, hlm. 278.

## **I.6 Hipotesis**

Hiptotesis dari dari penelitian ini adalah IMF sebagai lembaga keuangan internasional mempunyai andil yang cukup besar terhadap kebijakan privatisasi BUMN yang diambil pemerintah Indonesia paska krisis yang tertuang dalam LoI kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan IMF.

## **I.7 Asumsi**

Pengambilalihan saham PT. Indosat Tbk, pada tahun 2002 diasumsikan oleh adanya kebijakan privatisasi BUMN oleh pemerintah Indonesia paska krisis ekonomi tahun 1998.

## **I.8 Metodologi Penelitian**

Sejalan dengan alur pemikiran dari penelitian ini, penelitian bersifat *deskriptif analitik*. Jenis penelitian adalah penelitian *kuantitatif* dengan memaparkan studi kasus. Alasan menggunakan metode studi kasus adalah, kerangka pemikiran yang ada di alamatkan pada kasus yang relevan dan nantinya dapat dianalisa sehingga dapat menggambarkan dan menjelaskan bagaimana fenomena itu terjadi, sehingga hasil penelitian bisa menjawab pertanyaan penelitian yang pada akhirnya tujuan penelitian yang telah ditetapkan akan tercapai. Penelitian ini akan berangkat dari sebuah asumsi awal, dan akan mengkonfirmasi asumsi tersebut dengan melihat kasus privatisasi di sektor telekomunikasi di Indonesia.

Metode pengumpulan data akan dilakukan dengan review literatur yang ada mulai dari hasil penelitian, jurnal, tesis, serta dengan mengumpulkan semua bahan bacaan seperti koran, majalah, internet, buku dan lain lain yang dapat menggambarkan alur proses kasus yang dipilih dalam penelitian ini.

## **I.9 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan laporan peneltian akan disusun ke dalam beberapa bab, antara lain :

BABI : Bab ini merupakan Pendahuluan, yang mengungkapkan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan

Pustaka, Hipotesis, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian serta Sistematika Penulisan dari penelitian ini.

- BAB II : Bab ini membahas kebijakan pemerintah Indonesia tentang Privatisasi BUMN, pasca krisis yang tertuang dalam LoI antara Pemerintah Indonesia dan IMF. Mengulas peran BUMN di Indonesia dan perkembangannya.
- BAB III : Bab ini memaparkan bagaimana proses divestasi saham PT. Indosat Tbk, oleh pemerintah Indonesia yang dimenangkan oleh STT Telecom sebagai anak perusahaan Temasek Holding Corp.
- BAB IV : Bab ini merupakan suatu kesimpulan akhir yang berusaha memberikan analisis tentang seberapa jauh data-data yang dianalisa menurut teori dan implementasi yang digunakan sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

